

APLIKASI MONITORING PROGRES KEGIATAN BADAN GEOLOGI

Moch. Ali Ramdhani
Agus Cahyana

ABSTRAK

Penerapan PP 39/2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh. Salah satu dari implementasi kebijakan, program, dan proyek pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Pengadaan barang/jasa dengan sumber pendanaan dari APBN/APBD diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis Website (e-Monev) merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan menuju pada peningkatan kualitas dengan melakukan penyederhanaan terhadap format, aplikasi dan mekanisme pelaporan Monev Kinerja Pembangunan. Mengingat kewajiban K/L/D/I melaporkan realisasi PBJ sesuai amanat Pasal 115 Ayat (2) Perpres 54/2010, untuk itu sebagai sarana Pelaporan Rencana dan Realisasi PBJP, maka penulis merancang “**Aplikasi Monitoring Progres Kegiatan Badan Geologi**” yang dapat digunakan oleh K/L/D/I untuk pelaporan dan pemantauan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan masing-masing.

Kata Kunci : Monitoring, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah saat ini terus berupaya mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Salah satunya dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada setiap Unit Kerja dan atau Satuan Kerja yang ada di seluruh Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada **portal inaproc /Lpse / LKPP; (Indonesia E-Procurement)/(Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) dan I(Lembaga Kajian Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah)** sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Bunyi pasal 15 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kewajiban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah melaksanakan rencana umum pengadaan yang pada tahap akhir adalah Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui **Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)**.

Paradigma keterbukaan informasi kepada publik khususnya di dalam bidang penyerapan dan pengelolaan anggaran pemerintah ditindak-lanjuti dengan dikembangkannya **Sistem Monitoring (SiMON-online LKPP)** yang mendukung dan memfasilitasi **Sistem Informasi Monev TEpra (Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran)** yang langsung dimonitor oleh Presiden. Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEpra) dibentuk Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, berfungsi untuk memperkuat dari sisi monitoringnya guna mengidentifikasi potensi hambatan yang mungkin terjadi sehingga kita bisa melakukan percepatan dalam penyelesaian dan memperlancar proses pelaksanaan anggaran

Tahun 2015 merupakan tahun pertama realisasi Visi dan Misi Nawacita. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Oktober 2015 baru tercapai 55,4% dan yang belum terealisasi sebesar 44,6% dalam 2 (dua) bulan terakhir. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 66,9%, menunjukkan bahwa realisasi mengalami penurunan sebesar 11,5%.

Menyikapi rendahnya realisasi anggaran 2015, Presiden Jokowi berpesan melalui Menteri Keuangan kepada segenap Eselon I Kementerian Negara/Lembaga agar mempercepat tender/lelang pengadaan barang/jasa tahun 2016 lebih cepat dan lebih baik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam laporannya menyebutkan Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 Kementerian ESDM sebesar 62,88 persen dari anggaran sebesar Rp.15,1 triliun, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016 KESDM berkomitmen untuk menggenjot serapan hingga lebih dari 90 persen dengan melakukan persiapan matang dan terencana.

Menindaklanjuti komitmen KESDM, maka Badan Geologi sebagai eselon 1 pada kementerian ESDM memberikan tugas tambahan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Geologi untuk secara rutin melaporkan progres fisik dan progress penyerapan keuangan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing unit/satker yang ada di lingkungan Badan Geologi, dengan tujuan agar pelaksanaan penyerapan anggaran pembangunan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat sesuai perencanaan yang dijadwalkan dan pelaksanaanya dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir hambatan proses penyerapan anggaran.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Monitoring

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

2.2. Tujuan monitoring

Tujuan dari monitoring adalah untuk menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

2.3. Data dan Informasi untuk monitoring

Data serta informasi monitoring dapat diperoleh melalui berbagai metode, yaitu:

1. Metode dokumentasi, yaitu dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/semesteran/bulanan.
2. Metode survei, tujuannya untuk menjaring data dari para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran.
3. Metode observasi lapangan, yaitu untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei.
4. Metode wawancara, merupakan pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan.
5. Metode campuran, misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas
6. Metode *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para *stakeholders* yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.

2.4. Jenis-jenis Monitoring

Jenis-jenis monitoring dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan (*compliance*), jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementor terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (*auditing*), jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumberdaya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran.
3. Akuntansi (*accounting*), jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan.
4. Eksplanasi (*explanation*), jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan.

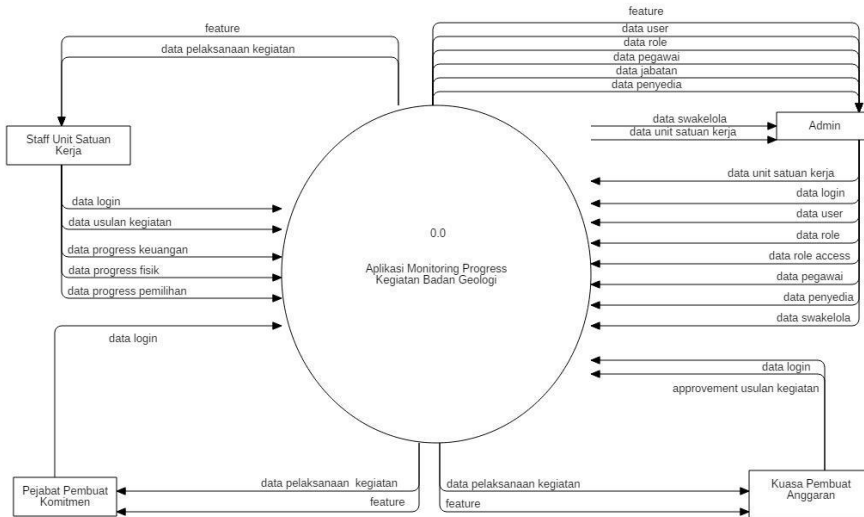
2.5. Pendekatan terhadap Monitoring:

Dalam melakukan monitoring, dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu:

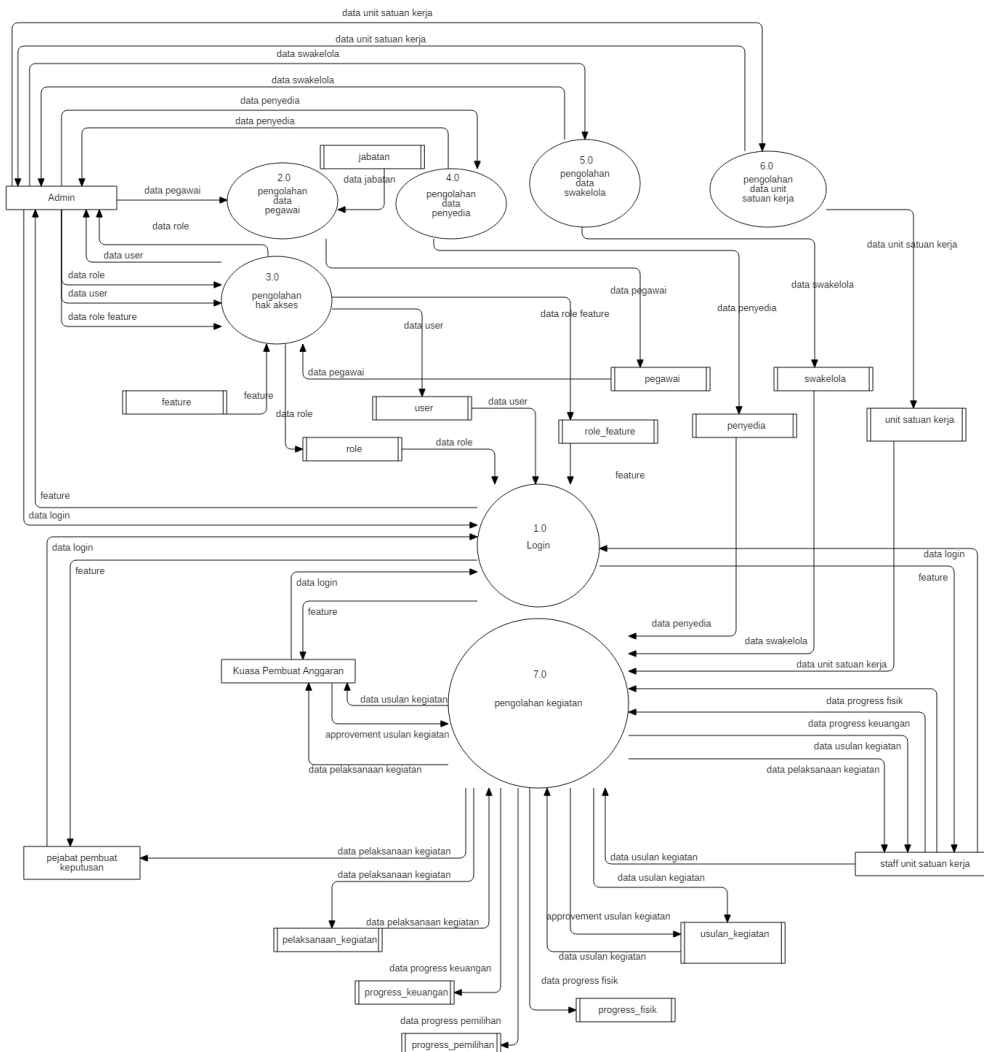
1. Akuntansi sistem sosial, pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu.
2. Eksperimental sosial, pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol.
3. Akuntansi sosial, pendekatan monitoring yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran/hasil, dan dampak.
4. Sintesis riset dan praktek, pendekatan monitoring yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau.

3. PEMBAHASAN

Aplikasi monitoring dibawah ini menjelaskan peran setiap entitas kedalam sistem monitoring yang dibangun guna hasil yang lebih cepat, tepat dan akurat dimana entitas yang terlibat diantaranya staf unit satuan, admin, pejabat pembuat komitmen dan kuasa pembuat anggaran. lebih jelasnya sebagai berikut :



Gambar 1 Diagram Konteks Aplikasi Monitoring Progres Kegiatan Badan Geologi



Gambar 2 DFD Aplikasi Monitoring Progres Kegiatan Badan Geologi

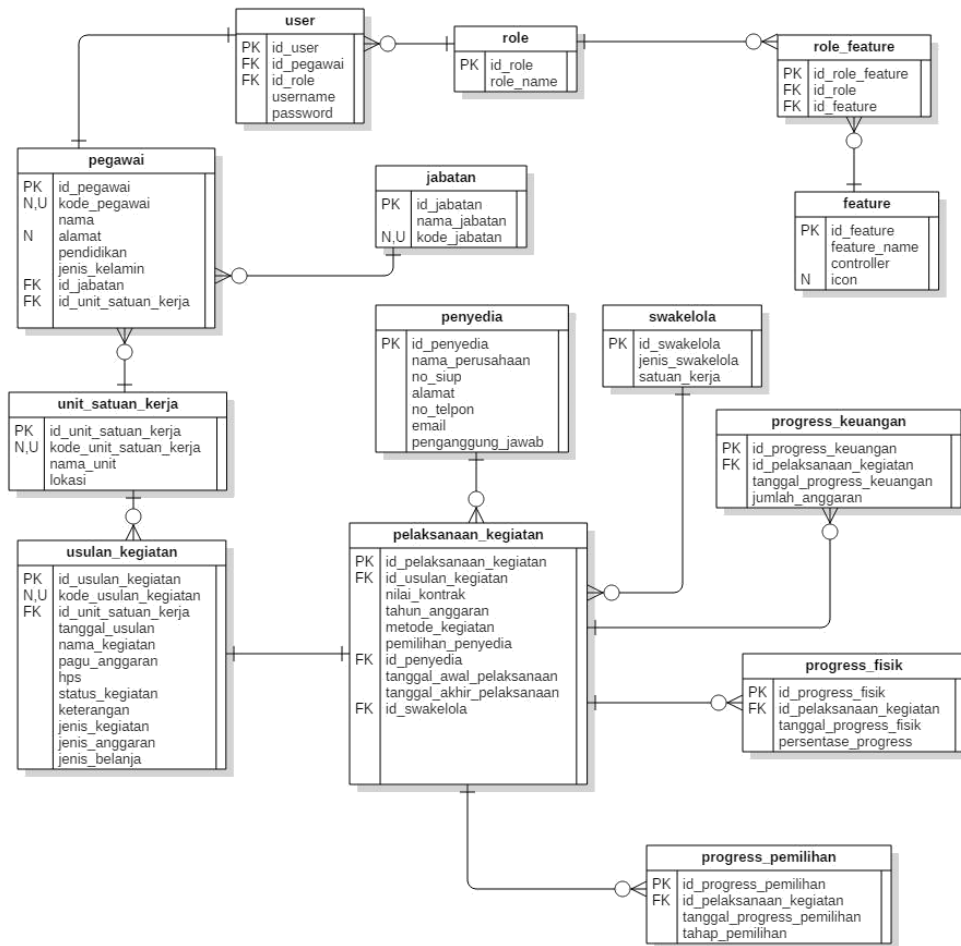
Penjelasan diagram di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penjelasan Diagram DFD Aplikasi Monitoring Progres Kegiatan Badan Geologi

Proses	Nama Proses	Keterangan
1.0	Login	Proses yang menjadi pintu masuk bagi pengguna sesuai dengan hak aksesnya.
2.0	Pengolahan Data Pegawai	Proses yang mengolah data pegawai
3.0	Pengolahan Hak Akses	Proses yang mengolah hak akses user terhadap feature yang ada
4.0	Pengolahan Data Penyedia	Proses untuk mengolah data penyedia.
5.0	Pengolahan Data Swakelola	Proses untuk mengolah data swakelola
6.0	Pengolahan Data Unit Satuan Kerja	Proses untuk mengolah data unit satuan kerja yang ada.
7.0	Pengolahan Kegiatan	Proses untuk mengolah kegiatan yang dilakukan unit satuan kerja.

3.1. Rancangan Basis Data

Adapun *Aplikasi Monitoring Progres Kegiatan Unit Lauanan Pengadaan (ULP) Badan Geologi* dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan peran entitas di dalam sistem informasi monitoring. Tujuan pengelompokan tersebut guna membantu pengguna untuk mengolah dan mengawasi data yang ada di dalam sistem. Database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yang direalisasikan dengan *relation key* yang digambarkan dalam *entity relationship diagram*. *Entity relationship diagram* dari database yang dibuat dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 3 ERD Aplikasi Monitoring Progres Kegiatan Badan Geologi

3.2. Testing

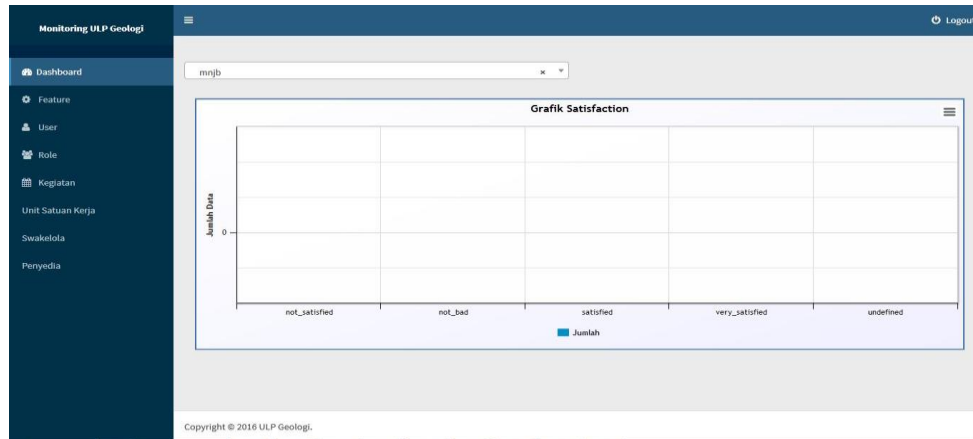
Berikut tabel pengujian pada aplikasi monitoring progres kegiatan badan geologi pada modul formulir untuk pengisian data pegawai :

Tabel 2. Tabel Pengujian Pada Aplikasi Monitoring Progres Kegiatan Badan Geologi

Kode/ Kasus	Data Masukan	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Pass/ Fail
1	<i>Field</i> nama diisi data numeric	Ditampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan	<i>Pass</i>
	<i>Field</i> nama tidak diisi	Ditampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan	<i>pass</i>
	unit tidak diisi	Ditampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan	<i>pass</i>
	Kode pegawai tidak diisi	Ditampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan	<i>pass</i>
	<i>Field</i> tanggal lahir diisi angka	Ditampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan	<i>Pass</i>
2	Nama <i>role</i> tidak diisi	Ditampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan	<i>Pass</i>
3	Memasukkan <i>role</i> yang tidak ada	<i>Autocomplete</i> tidak muncul	Sistem tidak memunculkan <i>autocomplete</i>	<i>Pass</i>
	Memasukkan <i>feature</i> sembarang	<i>Autocomplete</i> tidak muncul	Sistem tidak memunculkan <i>autocomplete</i>	<i>pass</i>
	Klik tombol <i>save</i>	Basis data <i>ter-update</i>	Basis data <i>ter-update</i>	<i>pass</i>
4	Nama unit tidak diisi	Ditampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan	<i>pass</i>
5	Mengirim masukkan berupa <i>query</i>	Ditampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan	<i>pass</i>
6	<i>Field</i> jumlah diisi karakter	Ditampilkan pesan kesalahan	Sistem menampilkan pesan kesalahan	<i>pass</i>

3.3. Implementasi

Halaman berikut adalah default menu yang akan pertama kali diakses ketika user berhasil masuk kedalam sistem. Halaman ini menampilkan graphic chart dari data-data progres kegiatan badan geologi.



Gambar 4. Default Menu Yang Akan Pertama Kali Diakses Ketika User Berhasil Masuk Kedalam Sistem

4. KESIMPULAN

Dari hasil kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Aplikasi ini, layanan informasi progres pelaksanaan kegiatan dapat di ketahui oleh Pimpinan yang berkepentingan, secara langsung/ *real time* dan *up to date*, sehingga dapat meminimalisir kendala pelaksanaan program kegiatan sedini mungkin.

5. DAFTAR PUSTAKA

Fatansyah. (2004). *Basis Data*, Bandung: Informatika.

Hartono, Jogiyanto. (1999). *Pengenalan Komputer Dasar Ilmu Komputer, Pemrograman, Sistem Informasi dan Intelegensi Buatan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Kadir, Abdul; Triwahyuni, Terra Ch. (2003). *Pengenalan Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Kristanto, Andri. (2004). *Rekayasa Perangkat Lunak (Konsep Dasar)*. Yogyakarta: Gava Media.

Nugroho, Bunafit. (2004). *PHP dan MySQL dengan Editor DreamweaverMX*. Yogyakarta: Andi.

Sigit, Ponco W. (1999). *Analisis dan Perancangan Sistem*. Jakarta: LP3I.

Sutarman. (2003). *Membangun Aplikasi WEB Dengan PHP dan MySQL*. Yogyakarta: Graha Ilmu.